

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJIP)
KECAMATAN MOJOSARI**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
MOJOKERTO
TAHUN 2025**

Kata Pengantar

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Mojosari Tahun Anggaran 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Mojosari Tahun 2025 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Kerja (Renja), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Januari 2026

Pt. CAMAT MOJOSARI



YULIUS BAKHTIAR, S.P., M.M.

Pembina

NIP. 196607131986031007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Tahun 2025. Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menyusun 2 Perjanjian Kinerja, yaitu Perjanjian Kinerja yang disusun sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan yang disusun setelah penetapan periode perencanaan baru 2025-2029. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memiliki 1 sasaran strategis dengan total 1 indikator kinerja dan 1 target kinerja yang harus dicapai, sedangkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 memiliki 4 sasaran strategis dan dengan 4 indikator kinerja dan 4 target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 3 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 2 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator

Dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2025-2029, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 0 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2021-2025)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	92	93,15	101%

Selain kinerja strategis di Perjanjian Kinerja periode 2021-2025 juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu:

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		100%	100%	100%
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83	84,32	101%
		3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	91,5%	90,3%	99%
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	82(Tinggi)	79,69 (Sedang)	93%
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		1 Inovasi	1 Inovasi	100%

2. Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2025-2029)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	92,00	93,15	101%
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	83	84,32	101%
Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%	100%	100%
Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Kinerja keuangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp 9.759.995.720,00 atau 90,31% dari total pagu anggaran sebesar Rp 10.807.365.855,00.

Capaian kinerja Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel	vi
BAB I PENDAHULUAN	8
I.1 Latar Belakang.....	8
I.2 Gambaran Umum	9
I.3 Isu-isu Strategis	12
I.4 Sistematika Penulisan.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
II.1 Penjenjangan Strategis	16
II.2 Indikator Kinerja Utama	23
II.3 Perjanjian Kinerja.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
III.1 Pengukuran Kinerja	28
III.2 Analisis Kinerja	30
III.3 Prestasi Kinerja Lainnya	42
III.4 Akuntabilitas Anggaran	44
BAB IV PENUTUP.....	47
LAMPIRAN	

Daftar Tabel

Tabel II.1 Matriks Penjenjangan Strategis

Tabel II.2 Indikator Kinerja Utama

Tabel II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tabel II.4 Anggaran Per Program

Tabel III.1.a Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

Tabel III.1.b Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tabel III.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan

Tabel III.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan SPM

Tabel III.4 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Tabel III.5 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran

Daftar Gambar

Gambar I.1 Peta Wilayah Kecamatan Mojosari

Gambar I.2 Struktur Organisasi Kecamatan Mojosari

Gambar III.1 Grafik Perbandingan Nilai SAKIP

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Landasan hukum penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah diatur dalam Perpres 29/2014 dan Permenpan RB 53/2014 sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menetapkan SAKIP sebagai rangkaian sistematis aktivitas untuk penetapan, pengukuran, pengelolaan data, dan pelaporan kinerja demi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP mencakup pelaporan kinerja sebagai elemen wajib, termasuk laporan interim dan tahunan atas prestasi kerja berdasarkan anggaran yang dialokasikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 memberikan petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah untuk menstandarisasi proses akuntabilitas. Laporan kinerja wajib menyajikan capaian target, analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, efisiensi sumber daya, serta perbandingan dengan standar nasional.

Penyusunan laporan kinerja diwajibkan untuk memastikan transparansi hasil kerja kepada publik, evaluasi objektif melalui revidi, dan bahan pertanggungjawaban pencapaian misi instansi sesuai RPJMN dan RPJMD. Hal ini mendukung peningkatan kinerja secara bertahap.

Laporan kinerja instansi pemerintah merupakan dokumen tahunan yang menyajikan pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Dokumen ini menggambarkan ikhtisar capaian kinerja berdasarkan rencana kerja dan anggaran yang dialokasikan, termasuk analisis keberhasilan, kegagalan, serta efisiensi penggunaan sumber daya.

Proses pembuatan laporan kinerja instansi pemerintah mengikuti tahapan sistematis sesuai petunjuk teknis untuk memastikan akuntabilitas dan kualitas data. Tahapan ini dimulai dari perencanaan hingga revidi akhir sebelum diserahkan.

Laporan kinerja memiliki hubungan erat dengan dokumen perencanaan sebagai alat evaluasi pencapaian target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dokumen ini menjadi umpan balik untuk menyempurnakan siklus perencanaan berikutnya dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan kinerja membandingkan realisasi capaian dengan target dari Renja (Rencana Kerja), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), dan Renstra (Rencana Strategis) untuk mengukur konsistensi dan keselarasan. Perpres 29/2014 dan PermenpanRB 53/2014 mewajibkan integrasi ini agar laporan mencerminkan efektivitas pelaksanaan rencana jangka menengah dan tahunan.

Hasil evaluasi dari laporan kinerja menjadi dasar penyesuaian target dan prioritas pada Renstra, Renja, serta RKPD tahun anggaran berikutnya. Laporan kinerja menyediakan data realisasi capaian dibandingkan target perencanaan sebelumnya, termasuk analisis varians dan efisiensi sumber daya. Informasi ini digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan program, sehingga perencanaan strategis dapat lebih realistis dan terukur.

I.2 Gambaran Umum

Kecamatan Mojosari termasuk wilayah Kabupaten Mojokerto dengan luas wilayah 26,65 km², tepatnya terletak sekitar 18 km sebelah timur dari pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto yang terdiri dari 112°33' Bujur Timur dan antara 7°31' Lintang Selatan dengan ketinggian 22 meter di atas permukaan laut. Adapun batas – batas wilayah kecamatan Mojosari sebagai berikut :

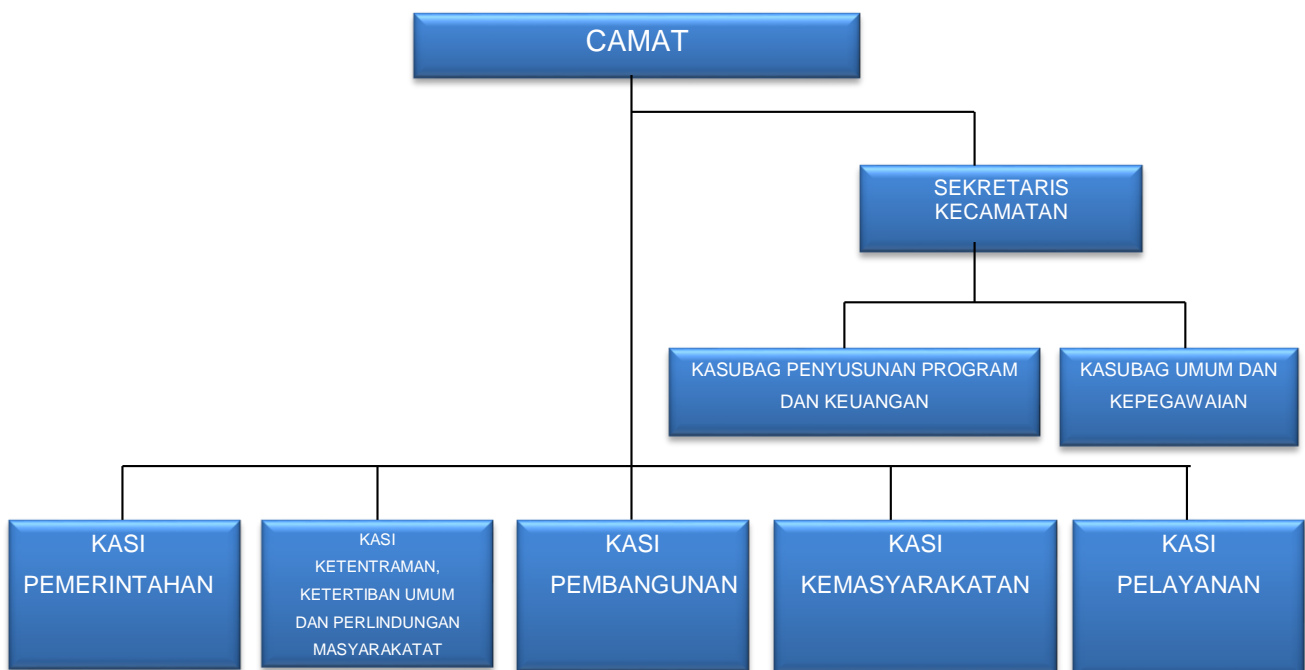
- Sebelah Utara : Kecamatan Prambon Kab. Sidoarjo
- Sebelah Timur : Kecamatan Pungging Kab. Mojokerto
- Sebelah Selatan : Kecamatan Kutorejo Kab. Mojokerto
- Sebelah Barat : Kecamatan Bangsal Kab. Mojokerto

PETA WILAYAH KECAMATAN MOJOSARI



Kecamatan Mojosari merupakan unit administratif di bawah pemerintah Kabupaten Mojokerto yang bertugas mengoordinasikan pelaksanaan pemerintahan umum, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Struktur organisasinya, sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MOJOSARI



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Mojosari

Susunan organisasi kecamatan mencakup Camat di puncak hierarki. Camat dibantu oleh Sekretariat Kecamatan yang terdiri dari Subbagian Umum dan Kepegawaian serta Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan. Struktur organisasi juga meliputi beberapa seksi utama seperti Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Seksi Pembangunan, Seksi Kemasyarakatan dan Seksi Pelayanan.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Kecamatan Mojosari didukung oleh aset milik pemerintah daerah yang digunakan untuk menunjang operasional pemerintahan dan pelayanan publik. Aset tersebut meliputi tanah, bangunan, sarana dan prasarana perkantoran serta fasilitas pendukung lainnya yang dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan.

KIB	Kode Akun	Rincian	Jumlah
I. ASET TETAP			
A	1.3.1.01.01.04	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	4.590.777.000,00
A	1.3.1.01.03.07	TANAH UNTUK JALAN	30.738.558.097,00
A	1.3.1.01.03.08	TANAH UNTUK BANGUNAN AIR	4.985.182.532,00
A	1.3.1.01.03.12	TANAH UNTUK MAKAM	8.849.375.000,00
A	1.3.1.01.03.17	TANAH KAMPUNG	3.581.444.000,00
		TOTAL KIB A	52.745.336.629,00
B	1.3.2.02.01.02	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	208.850.000,00
B	1.3.2.02.01.03	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	140.000.000,00
B	1.3.2.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	1.296.168.188,00
B	1.3.2.02.01.05	KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA	32.000.000,00
B	1.3.2.02.02.01	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	12.522.000,00
B	1.3.2.02.02.02	KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG	6.761.739,12
B	1.3.2.04.01.02	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK	49.100.000,00
B	1.3.2.05.01.04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	102.406.500,00
B	1.3.2.05.01.05	ALAT KANTOR LAINNYA	128.570.000,00
B	1.3.2.05.02.01	MEUBELAIR	393.572.944,99
B	1.3.2.05.02.04	ALAT PENDINGIN	203.190.150,00
B	1.3.2.05.02.06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	324.276.450,00
B	1.3.2.05.03.01	MEJA KERJA PEJABAT	34.675.000,00
B	1.3.2.05.03.02	MEJA RAPAT PEJABAT	38.001.000,00
B	1.3.2.05.03.03	KURSI KERJA PEJABAT	36.362.500,00
B	1.3.2.05.03.04	KURSI RAPAT PEJABAT	6.000.000,00
B	1.3.2.06.01.01	PERALATAN STUDIO AUDIO	108.255.000,00
B	1.3.2.06.01.02	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	14.560.000,00
B	1.3.2.06.02.01	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	3.735.000,00

B	1.3.2.06.02.06	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	1.480.000,00
B	1.3.2.07.01.01	ALAT KEDOKTERAN UMUM	121.249.000,00
B	1.3.2.07.01.05	ALAT KESEHATAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN	54.700.000,00
B	1.3.2.07.01.21	ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT	6.800.000,00
B	1.3.2.10.01.02	PERSONAL KOMPUTER	458.694.760,01
B	1.3.2.10.02.02	PERALATAN MINI KOMPUTER	95.507.388,89
B	1.3.2.10.02.03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	202.074.000,00
B	1.3.2.10.02.05	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	14.400.000,00
		TOTAL KIB B	4.093.911.621,01
C	1.3.3.01.01.01	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	10.630.712.806,00
C	1.3.3.01.01.02	BANGUNAN GUDANG	19.692.000,00
C	1.3.3.01.01.06	BANGUNAN KESEHATAN	480.294.306,62
C	1.3.3.01.01.10	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	222.943.260,00
		TOTAL KIB C	11.353.642.372,62
D	1.3.4.01.01.03	JALAN KABUPATEN	12.569.808.317,03
D	1.3.4.02.07.01	BANGUNAN PEMBAWA AIR KOTOR	13.944.681.778,28
D	1.3.4.02.07.03	BANGUNAN PEMBUANG AIR KOTOR	413.642.500,00
		TOTAL KIB D	26.928.132.595,31
TOTAL ASET TETAP			95.121.023.217,94
III. ASET LAIN-LAIN (RUSAK BERAT)			
	1.5.4.01.01.01.002	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	84.000.000,00

I.3 Isu-isu Strategis

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Mojosari tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat.

Adanya pertimbangan terkait isu-isu penting ini dilakukan agar selalu ada perbaikan ke depannya sehingga Kecamatan Mojosari dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan maksimal.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Mojosari antara lain:

Teknologi informasi yang menuntut kesiapan SDM yang handal dan profesional dalam berbagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pengembangan program/kegiatan;

Kurang maksimalnya pengetahuan masyarakat akan pelayanan yang diberikan (jenis, persyaratan dan prosedur pelayanan);

1. Kurangnya pengawasan berbasis kinerja;

Kurang meratanya pembagian kegiatan yang berhubungan langsung maupun yang tidak berhubungan langsung dengan kinerja selaku perangkat daerah hingga berdampak pada kurang maksimalnya peran Kecamatan Mojosari terhadap perwujudan pencapaian visi dan misi daerah.

Meningkatkan pelayanan kecamatan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan terkait sumber daya manusia, infrastruktur, dan koordinasi, namun juga membuka peluang melalui inovasi digital dan optimalisasi peran kecamatan. Adapun tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan kecamatan adalah sebagai berikut:

- Tantangan

Rendahnya kompetensi SDM dalam perencanaan, administrasi keuangan, dan teknologi informasi menghambat pelayanan efektif. Kurangnya koordinasi antar unit kerja, stakeholder, serta infrastruktur terbatas seperti akses geografis sulit menjadi hambatan umum. Pemahaman masyarakat terhadap standar pelayanan masih minim, ditambah beban legitimasi dari kabupaten yang menambah tekanan aparat.

- Peluang

Optimalisasi peran kecamatan melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) memungkinkan pelayanan cepat, transparan, dan satu loket. Inovasi seperti layanan daring dan pelimpahan wewenang dari bupati ke camat dapat meningkatkan kualitas, terutama di wilayah terpencil. Dukungan stakeholder dan kepercayaan masyarakat membuka ruang untuk responsif terhadap dinamika pembangunan.

Isu-isu penting dalam perumusan program dan kegiatan kecamatan diformulasikan dari evaluasi Rencana Kerja sebelumnya, identifikasi permasalahan, serta prediksi tantangan strategis seperti peningkatan pelayanan dan koordinasi. Rekomendasi ini dirancang strategis untuk ditindaklanjuti, selaras dengan Rencana Strategis, dan relevan bagi Kecamatan Mojosari. Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Isu dan Rekomendasi Pelayanan

Kurang optimalnya pelayanan administrasi terpadu (PATEN) akibat keterbatasan SDM dan infrastruktur. Rekomendasi: meningkatkan pelatihan aparatur dan fasilitasi standar pelayanan minimal melalui program peningkatan kapasitas kinerja.

2. Isu dan Rekomendasi Koordinasi

Minimnya sinergi antar perangkat daerah, desa, dan stakeholder dalam perencanaan pembangunan. Rekomendasi: Menyelenggarakan rakor rutin Muspika dan pendampingan desa untuk efektivitas pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

3. Isu dan Rekomendasi Pemberdayaan

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan. Rekomendasi: Melakukan pembinaan organisasi masyarakat.

I.4 Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Mojosari selama tahun 2025. Capaian kinerja tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja tahun 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Mojosari Tahun 2025 terdiri dari 4 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menyampaikan secara ringkas latar belakang disusunnya Laporan Kinerja; profil yang meliputi gambaran umum, struktur organisasi, tugas, dan fungsinya; isu-isu strategis; serta sistematika penulisan Laporan Kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menyampaikan ringkasan perencanaan sesuai dengan perencanaan strategis dan perjanjian kinerja sebagai dasar pelaporan kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyampaikan capaian kinerja berdasarkan realisasi yang telah dicapai dari target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan penjelasan atas capaian dimaksud dengan data-data pendukung. Selain itu, juga menyampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja dan rencana tindak lanjut dalam mengatasi tantangan dan hambatannya. Realisasi anggaran juga disajikan dalam bab ini.

BAB IV PENUTUP

Menyampaikan kesimpulan secara umum atas capaian kinerja serta harapan dan upaya yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun kedepan dalam rangka peningkatan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 Penjenjangan Strategis

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah serta menjamin ketercapaian target kinerja yang telah ditetapkan, pelaksanaan Perjanjian Kinerja pada tahun berjalan disusun dengan mengacu pada dua periode dokumen perencanaan, yaitu Renstra Tahun 2021–2025 dan Renstra Tahun 2025–2029. Kondisi ini terjadi sebagai bagian dari masa transisi perencanaan, di mana sebagian program dan kegiatan masih berlandaskan pada prioritas periode sebelumnya, sementara arah kebijakan dan target kinerja periode baru mulai diimplementasikan secara bertahap.

Sesuai dengan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/280HK/416-012/2023 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2025, Pemerintahan Kabupaten Mojokerto di Tahun 2021-2015 memiliki 1 Visi yang didukung dengan 4 misi. Visi Kabupaten Mojokerto adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia”

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka di jabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai-nilai Keimanan dan Ketakwaan
2. Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih,Transparan
4. Pemerataan & perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Kecamatan Mojosari sebagai salah satu OPD di Kabupaten Mojokerto turut menyokong misi yang ke 3 yaitu ;

“ Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih,Transparan “

Untuk mencapai kondisi tersebut , berikut matrik penjenjangan strategisnya :

Tabel II.1.a Matriks Penjenjangan Strategis (sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator	Target
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			IKM Kecamatan	92
Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan			IKM Kecamatan	92
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,5
			Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi	90%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	90%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Indeks Profesionalitas ASN PD	82
Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	92%
			Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	92%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen
Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	100%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Paket
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Paket
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	100%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan yang Diselenggarakan Sesuai Standar	100%
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	100%
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	975 Layanan
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil koordinasi yang di tindaklanjuti	100%
			Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan koordinasi	23 Fasilitasi
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 Dokumen

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029 serta menjawab berbagai tantangan dan permasalahan strategis yang dihadapi di wilayah Kecamatan Mojosari, diperlukan perencanaan pembangunan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mojosari sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan.

Perencanaan pembangunan Kecamatan Mojosari mengacu pada visi Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto, yaitu:

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil, dan Makmur.”

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, Kabupaten Mojokerto memiliki 4 misi yang perlu dilaksanakan, yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman masyarakat.
3. Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang sejahtera.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Visi ini menjadi arah utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di seluruh perangkat daerah, termasuk Kecamatan Mojosari.

Dalam rangka tugas utama *“membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif”*, Kecamatan Mojosari mengampu **Misi ke 1 Kabupaten Mojokerto** sebagaimana tertuang dalam *Catur Abhipraya Mubarak*, yaitu:

“Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.”

Misi ini selaras dengan tugas dan fungsi kecamatan sebagai perangkat daerah yang berperan langsung dalam pelayanan publik, pembinaan pemerintahan desa, dan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah kecamatan.

Sebagai penjabaran dari misi tersebut, Kecamatan Mojosari menetapkan tujuan perangkat daerah dalam Renstra Kecamatan Mojosari Tahun 2025–2029, yaitu:

“Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan.”

Tujuan ini mencerminkan komitmen Kecamatan Mojosari untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan sasaran Renstra Kecamatan Mojosari Tahun 2025–2029, yaitu:

“Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan.”

Sasaran ini diukur dengan **Indikator Kinerja Sasaran berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan**, sebagai ukuran keberhasilan pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Untuk mencapai kondisi tersebut, berikut matriks penjenjangan strategisnya:

Tabel II.1.b Matriks Penjenjangan Strategis (sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target
Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan				IKM Kecamatan	92
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				1. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90%
				2. Persentase Realisasi Anggaran PD	90,3%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%	90%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan
Administrasi Umum Perangkat Daerah				Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	85%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	2 Dokumen
Penyediaan Bahan/Material				Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	12 Paket
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	85%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6 Unit
			Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	90
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	100%
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	17 Laporan
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil koordinasi yang di tindaklanjuti	100%
			Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan koordinasi	23 Fasilitasi
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Pemerintahan Desa	5 Dokumen
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 Dokumen

Melalui keterpaduan antara visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut, Kecamatan Mojosari diharapkan mampu berkontribusi secara optimal dalam pencapaian visi pembangunan Kabupaten Mojokerto serta mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas

II.2 Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan perencanaan strategis yang telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya, Kecamatan Mojosari memiliki indikator kinerja utama sesuai dengan tugas dan fungsi utamanya. Indikator kinerja utama tersebut, sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan utama dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan IKU Kecamatan Mojosari mengacu pada dokumen perencanaan daerah, yaitu RPJMD dan Renstra Kecamatan Mojosari, serta diselaraskan dengan tugas dan fungsi kecamatan.

Setiap indikator kinerja utama dirumuskan secara terukur dan dilengkapi dengan formulasi penghitungan, definisi indikator, serta sumber data yang jelas guna menjamin konsistensi pengukuran dan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan perencanaan strategis yang telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya, Kecamatan Mojosari memiliki indikator kinerja utama sesuai dengan tugas dan fungsi utamanya. Indikator kinerja utama tersebut, sebagai berikut:

1. Tabel II.2.a Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2021-2025)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1	Terwujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	Nilai	Laporan Hasil Sukma E Definisi Operasional : Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam menempuh jaminan akses informasi publik berdasarkan pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi. Ket Nilai : Kategori Tidak Baik : 25,00 – 64,99 Kategori Kurang Baik : 65,00 – 76,60 Kategori Baik : 76,61 – 88,30 Kategori Sangat Baik : 88,31 – 100,00	Laporan Hasil Sukma e

No	Kinerja Lainnya	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1	Terselenggaranya Pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	%	(Jumlah Pelayanan Yang Terlayani Sesuai Standart Pelayanan / Jumlah Pelayanan Yang Terlayani) x 100%	Kecamatan
2	Terselenggaranya Fasilitas dan Koordinasi Pemerintahan	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	%	(Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Yang Ditindaklanjuti / Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi) x 100%	Kecamatan
3	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif , Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Ket Nilai SAKIP : Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50 Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 -70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100	Inspektorat
		3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	(Realisasi Anggaran / Pagu Anggaran) x 100%	Kecamatan
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	Ket IP ASN : Kategori Sangat Rendah : =< 60 Kategori Rendah : 61 – 70 Kategori Sedang : 71 – 80 Kategori Tinggi : 81 – 90 Kategori Sangat Tinggi : 91 – 100	BKPSDM
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui pembangunan inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan pada Kecamatan	Kecamatan

2. Tabel II.2.b Indikator Kinerja Utama Perubahan tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2025-2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Kinerja layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	Nilai	<p>Laporan Hasil Sukma E Definisi Operasional : Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam menempuh jaminan akses informasi publik berdasarkan pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi.</p> <p>Ket Nilai : Kategori Tidak Baik : 25,00 – 64,99 Kategori Kurang Baik : 65,00 – 76,60 Kategori Baik : 76,61 – 88,30 Kategori Sangat Baik : 88,31 – 100,00</p>	Laporan Hasil Sukma e
2	Meningkatnya Kualitas tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	<p>Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Defisini operasional : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara terpadu dalam rangka mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel.</p> <p>Ket Nilai : Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50 Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 -70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100</p>	LHE SAKIP dari Inspektorat

3	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase Layanan yang diselenggarakan sesuai standar	%	<p>Persentase Layanan yang Diselenggarakan Sesuai Standar merupakan indikator kinerja untuk mengukur tingkat kepatuhan Kecamatan dalam menyelenggarakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan yang ditetapkan, meliputi persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi petugas, sarana prasarana, serta penanganan pengaduan. Indikator ini mencerminkan kualitas dan konsistensi pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.</p> <p>Formulasi : (Jumlah Pelayanan Yang Terlayani Sesuai Standart Pelayanan / Jumlah Pelayanan Yang Terlayani) x 100%</p>	Kecamatan
4	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	%	<p>Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti merupakan indikator kinerja untuk mengukur efektivitas Kecamatan dalam menindaklanjuti hasil koordinasi dengan perangkat daerah, instansi terkait, pemerintah desa/kelurahan, dan pemangku kepentingan lainnya. Indikator ini mencerminkan komitmen Kecamatan dalam mewujudkan hasil koordinasi ke dalam tindakan nyata guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.</p> <p>Formulasi : (Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Yang Ditindaklanjuti / Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi) x 100%</p>	Kecamatan

II.3 Perjanjian Kinerja

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2024, bahwa perjanjian kinerja dalam setahun akan mengalami perubahan, jika:

- a. Terjadi perubahan dan mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam perencanaan strategis yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan/atau alokasi anggaran);
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto disusun dan ditandatangani oleh kepala perangkat daerah pada bulan Januari dan akan dilakukan perubahan minimal 1 kali dalam setahun dalam rentang waktu maksimal 1 bulan setelah perubahan anggaran/pejabat ditetapkan. Perjanjian Kinerja Plt. Camat Mojosari Tahun 2025 yang telah mengalami perubahan dan dijadikan sebagai dasar pelaporan kinerja ini, indikatornya sebagai berikut:

Tabel II.3.A Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2021-2025)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	92	93,15	102%

Kinerja Lainnya	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	100%	100%
Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,5	84,32	101%
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	91,5%	90,3%	99%
	Indeks Profesionalitas ASN	82 (Tinggi)	79,13 (Tinggi)	99%

Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta Berkelanjutan	1 Inovasi	1 Inovasi	100%
---	---	-----------	-----------	------

Untuk mendukung pelaksanaan target pada perjanjian kinerja, ditetapkan alokasi anggaran sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025, sebagai berikut:

Tabel II.3.B Anggaran Per Program

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp. 7.224.893.790
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 23.900.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 3.582.472.065
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 503.572.000

Tabel II.3.C Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	92	93,15	102%
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	83	84,32	101%
Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%	100%	100%
Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Untuk mendukung pelaksanaan target pada perjanjian kinerja, ditetapkan alokasi anggaran, sebagai berikut:

Tabel II.3.D Anggaran Per Program

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp. 7.485.930.000

No	Program	Anggaran
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 25.000.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 4.038.790.0000
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 275.000.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Pengukuran Kinerja

Kinerja Kecamatan Mojosari tahun 2025 diukur dari pencapaian indikator sasaran strategis yang tercantum pada perjanjian kinerja. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 100% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh indikator sasaran strategis. Realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang diperjanjikan Kecamatan Mojosari Tahun 2025. Terdapat 2 Perjanjian Kinerja yang terealisasi sebagaimana pada tabel berikut ini :

Pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025 sebagai berikut :

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 3 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 2 indikator;

Tabel III.1.a Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025
(Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	92	93,15	102%

Selain kinerja strategis di Perjanjian Kinerja periode 2021-2025 juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu:

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		100%	100%	100%
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83	84,32	101%
		3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	91,5%	90,3%	99%
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	82 (Tinggi)	79,69	99%
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		1 inovasi	1 inovasi	100%

Dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2025-2029, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 3 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 2 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

Tabel III.1.b Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025
(Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi 2025	Capaian
				I	II	III	IV		
1	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	92	0	0	0	93,15	93,15	101%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	83	0	0	84,32	0	84,32	101%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi 2025	Capaian
				I	II	III	IV		
3	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%	25%	50%	75%	100%	100%	100%
4	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	25%	50%	75%	100%	100%	100%

III.2 Analisis Kinerja

Di tahun 2025, Kecamatan Mojosari memiliki 2 Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memiliki 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja dan 4 kinerja lainnya dengan 6 indikator kinerja.

Formulasi perhitungan seluruh sasaran strategis dengan indikator kinerja dan seluruh kinerja lainnya dengan indikator kinerja adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	Nilai	<p>IKM Kecamatan</p> <p>Ket: Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan</p> <p>Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.</p> <p>Kategori Tidak Baik : 25,00 – 64,99 Kategori Kurang Baik : 65,00 – 76,60 Kategori Baik : 76,61 – 88,30 Kategori Sangat Baik : 88,31 – 100,00</p> <p>Total dari Nilai Persepsi per Unsur ----- ---- x Nilai Penimbang Total Unsur yang Terisi</p>	Laporan Hasil Sukma-E

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
2.	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	Persentase	Jumlah layanan yang terlayani sesuai standar ----- ----- x 100% Jumlah pelayanan yang terlayani	Laporan Hasil Pelayanan
3.	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Persentase	Jumlah dokumen hasil koordinasi yang ditindaklanjuti ----- ----- x 100% Jumlah dokumen hasil koordinasi	Dokumen Hasil Koordinasi
4.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	Nilai SAKIP Kecamatan Ket: Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50 Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 -70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
5.		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Nilai	Formulasi Perhitungan : Prosentase realisasi anggaran ----- -----x 100% Tingkat kepuasan terhadap realisasi anggaran Perangkat Daerah	Realisasi Anggaran
6.		Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	Formulasi Perhitungan : Jumlah IP ASN Perangkat Daerah --- -----x 100% Tingkat kepuasan terhadap IP ASN Perangkat Daerah	Nilai IP ASN
7.	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Inovasi	Formulasi Perhitungan : Jumlah pelayanan melalui pembangunan inovasi ----- -----x 100% Tingkat kepuasan terhadap pelayanan melalui pembangunan inovasi	Laporan Pelaksanaan Inovasi

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 memiliki 4 sasaran strategis dan 4 indikator kinerja dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	Nilai	<p>IKM Kecamatan</p> <p>Ket: Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan</p> <p>Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kategori Tidak Baik : 25,00 – 64,99 Kategori Kurang Baik : 65,00 – 76,60 Kategori Baik : 76,61 – 88,30 Kategori Sangat Baik : 88,31 – 100,00</p> <p>Total dari Nilai Persepsi per Unsur ----- --- x Nilai Penimbang Total Unsur yang Terisi</p>	Laporan Hasil Sukma-E
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	<p>Nilai SAKIP Kecamatan</p> <p>Ket: Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50 Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 -70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100</p>	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
3.	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	Persentase	<p>Jumlah layanan yang terlayani sesuai standar ----- ----- x 100% Jumlah pelayanan yang terlayani</p>	Laporan Hasil Pelayanan
3.	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Persentase	<p>Jumlah dokumen hasil koordinasi yang ditindaklanjuti ----- ----- x 100% Jumlah dokumen hasil koordinasi</p>	Dokumen Hasil Koordinasi

Realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, cenderung mengalami peningkatan sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel III.2.a Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025
(Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2021			2022			2023			2024			2025			KET
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	83	86,02	105%	84	90	110%	85	88,5	105,28%	88,31	91,75	100,61%	89	93,15	102,4%	

No	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	2021			2022			2023			2024			2025			KET
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	81%	65,03%	80,28%	81%	97,41%	120,26%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	NA	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1 Nilai SAKIP Kecamatan	NA	NA	NA	76	79,5	102 %	77	77,65	100,97%	82	82,3	100,36%	82,5	84,32	102%	
		3.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	NA	NA	NA	81%	88%	113,38%	90%	87,12	97,96%	91%	92,48%	102,42%	91,5%	90,3%	99,03%	
		3.3 Indeks Profesionalitas ASN	NA	NA	NA	70	80	107%	75	79,28	105,29%	80	79,58	99%	82	79,69	99%	
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	NA	NA	NA	2 Inovasi	2 Inovasi	100%	1 Inovasi	1 Inovasi	100%	1 Inovasi	1 Inovasi	100%	1 Inovasi	1 Inovasi	100%	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	2021			2022			2023			2024			2025			KE T
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	81%	65,03%	80,28%	81%	97,41%	120,26%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	NA	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Kecamatan	NA	NA	NA	76	79,5	102 %	77	77,65	100,97%	82	82,3	100,36%	82,5	84,32	102%	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	NA	NA	NA	2 Inovasi	2 Inovasi	100%	1 Inovasi	1 Inovasi	100%	1 Inovasi	1 Inovasi	100%	1 Inovasi	1 Inovasi	100%	

Capaian indikator “IKM Kecamatan” pada sasaran strategis Tewujudnya pelayanan publik yang optimal di tahun 2025 adalah sebesar 93,15 angka capaian tersebut didapatkan dari rata-rata nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) disemester 1 yakni sebesar 92,46 dan nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) disemester 2 yakni sebesar 94,28. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu:

- a. Kualitas pelayanan yang baik , meliputi waktu, prosedur serta persyaratan yang tidak berbelit
- b. Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Ramah
- c. Sarana dan prasarana yang cukup memadai, terdiri dari ruang tunggu yang nyaman, fasilitas yang ramah disabilitas serta system antrian yang tertib
- d. Transparansi serta kepastian layanan

1. Capaian indikator “Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan” pada sasaran strategis Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan di tahun 2025 adalah sebesar 100%. Angka capaian tersebut didapatkan dari akumulasi laporan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) triwulan 1 sampai dengan triwulan 4. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya :

- A. SOP yang terdokumentasi dan mudah dipahami
- B. Adanya Budaya kerja yang responsif dan ramah
- C. Dilakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap pelayanan
- D. Adanya laman pengaduan yang mudah diakses oleh warga

2. Capaian indikator “Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti” pada sasaran strategis Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan di tahun 2025 adalah sebesar 100%. Angka capaian tersebut didapatkan dari dokumen hasil koordinasi yang telah di tindaklanjuti ditahun berjalan. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya :

- A. Adanya penanggungjawab untuk menindaklanjuti setiap koordinasi
- B. Tidak saling lempar tanggung jawab antar bidang/bagian
- C. Dilakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala

3. Capaian indikator “Nilai Sakip Perangkat Daerah” pada sasaran strategis

3. Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di tahun 2025 adalah sebesar 84,32. Angka capaian tersebut didapatkan dari nilai yang ada pada dokumen Laporan Hasil Evaluasi AKIP tahun berjalan. Penilaian AKIP tersebut meliputi penilaian perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya :

- A. Adanya dokumen perencanaan kinerja yang terukur dan relevan
- B. Tim SAKIP memahami regulasi dan teknis penyusunan
- C. Adanya Program/kegiatan yang mendukung langsung pencapaian indikator
- D. Data capaian indikator valid dan dapat dipertanggungjawabkan
- E. Tertib Administrasi dan Dokumentasi

4. Capaian indikator “Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah” pada sasaran strategis Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di tahun 2025 adalah sebesar 90,3%. Angka capaian tersebut didapatkan dari perbandingan capaian anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya :

- A. Perencanaan anggaran yang matang
- B. Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan
- C. Adanya Evaluasi realisasi yang dilakukan secara berkala
- D. Koordinasi yang baik antar PPTK, bendahara, dan PA
- E. Kepatuhan terhadap aturan pengelolaan keuangan

5. Capaian indikator “Indeks Profesionalitas ASN” pada sasaran strategis Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di tahun 2025 adalah sebesar 79,69. Angka capaian tersebut didapatkan dari dokumen Nilai IP ASN.

Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya :

- A. Adanya penilaian kinerja yang Objektif
- B. Adanya Komitmen Pimpinan dalam Pembinaan ASN
- C. Penempatan pegawai sesuai latar belakang pendidikan

6. Capaian indikator “Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan” pada sasaran strategis Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui

Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah di tahun 2025 adalah sebesar 1 inovasi. Angka capaian tersebut didapatkan dari dokumen laporan inovasi. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya:

- A. Adanya penyebaran inovasi kepada ASN dan masyarakat
- B. Adanya dukungan sumber daya terutama Sarana dan prasarana mendukung
- C. Dilakukan perbaikan dan penyempurnaan
- D. Dokumentasi dan Legalitas yang Kuat pada setiap inovasi

Tabel III.2.b Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	88,31	88,85	100,61 %	89	91,13	102,4 %
2	Meningkatnya Kualitas tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	82	82,3	100,36 %	82,5	83,11	100,74 %
3	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase Layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Realisasi
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	IKM Kecamatan	88,31	91,75	100,61 %	89	91,13	102,4%
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Kecamatan	82	82,30	100,36 %	82,5	83,11	100,74 %
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel III.2.c Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Target Akhir
RENSTRA pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025
(Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Progres Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025		
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	86,02	90	88,5	91,75	93,15	88	105%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Progres Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025		
1	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	100 %	100%	100%	100%	-	-
2	Terselenggaranya fasilitas dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	N/A	100 %	100%	100%	100%	-	-
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	A. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A	79,5	77,65	82,30	84,32	-	-
		B. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	N/A	88%	87,12 %	92,48 %	90,3 %		
		C. Indeks Profesionalitas ASN	N/A	80	79,28	79,58	79,69		
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1	1	1	1	1	-	-

1. Capaian indikator “IKM Kecamatan” pada sasaran strategis Twujudnya pelayanan publik yang optimal di tahun 2025 adalah sebesar 93,15 angka capaian tersebut didapatkan dari rata-rata nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) disemester 1 yakni

sebesar 92,46 dan nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) disemester 2 yakni sebesar 94,28. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu:

- a. Kualitas pelayanan yang baik , meliputi waktu, prosedur serta persyaratan yang tidak berbelit
- b. Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Ramah
- c. Sarana dan prasarana yang cukup memadai , terdiri dari ruang tunggu yang nyaman, fasilitas yang ramah disabilitas serta system antrian yang tertib
- d. Transparansi serta kepastian layanan

2. Capaian indikator “Nilai Sakip Perangkat Daerah” pada sasaran strategis Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di tahun 2025 adalah sebesar 84,32. Angka capaian tersebut didapatkan dari nilai yang ada pada dokumen Laporan Hasil Evaluasi AKIP tahun berjalan. Penilaian AKIP tersebut meliputi penilaian perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya :

- A. Adanya dokumen perencanaan kinerja yang terukur dan relevan
- B. Tim SAKIP memahami regulasi dan teknis penyusunan
- C. Adanya Program/kegiatan yang mendukung langsung pencapaian indicator
- D. Data capaian indikator valid dan dapat dipertanggungjawabkan
- E. Tertib Administrasi dan Dokumentasi

3. Capaian indikator “Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan” pada sasaran strategis Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan di tahun 2025 adalah sebesar 100%. Angka capaian tersebut didapatkan dari akumulasi laporan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) triwulan 1 sampai dengan triwulan 4. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya :

- A. SOP yang terdokumentasi dan mudah dipahami
- B. Adanya Budaya kerja yang responsif dan ramah
- C. Dilakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap pelayanan
- D. Adanya laman pengaduan yang mudah diakses oleh warga

4. Capaian indikator “Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti” pada sasaran strategis Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan di tahun 2025 adalah

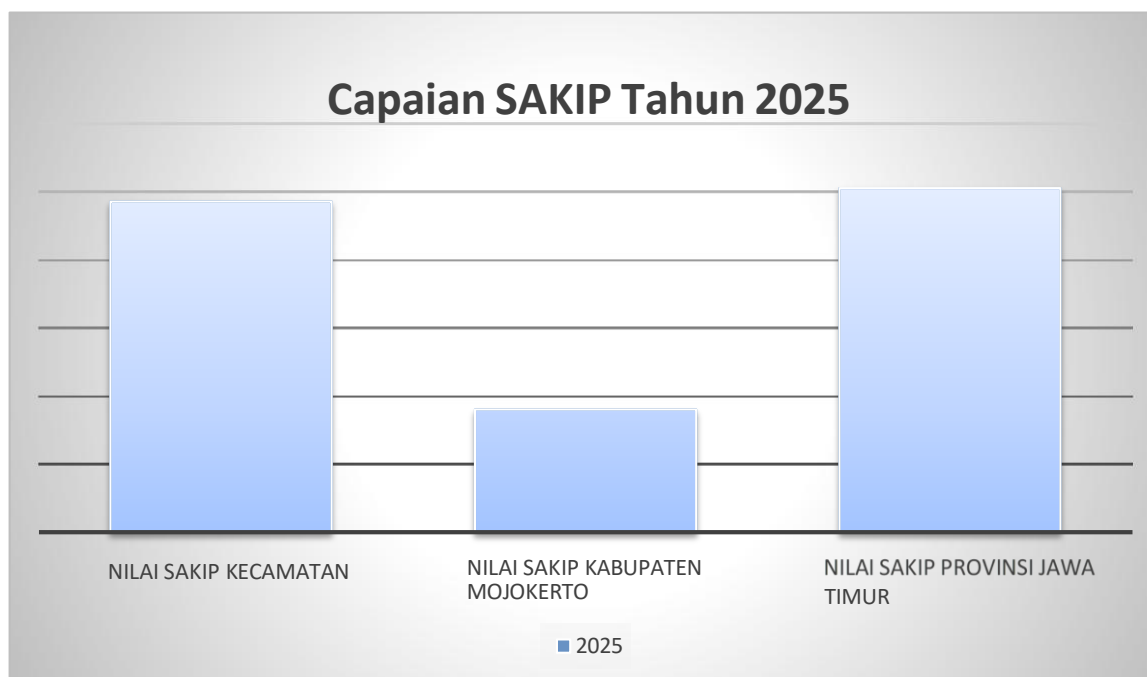
sebesar 100%. Angka capaian tersebut didapatkan dari dokumen hasil koordinasi yang telah di tindaklanjuti ditahun berjalan. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya :

- A. Adanya penanggungjawab untuk menindaklanjuti setiap koordinasi
- B. Tidak saling lempar tanggung jawab antar bidang/bagian
- C. Dilakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala

III.3 Prestasi Kinerja Lainnya

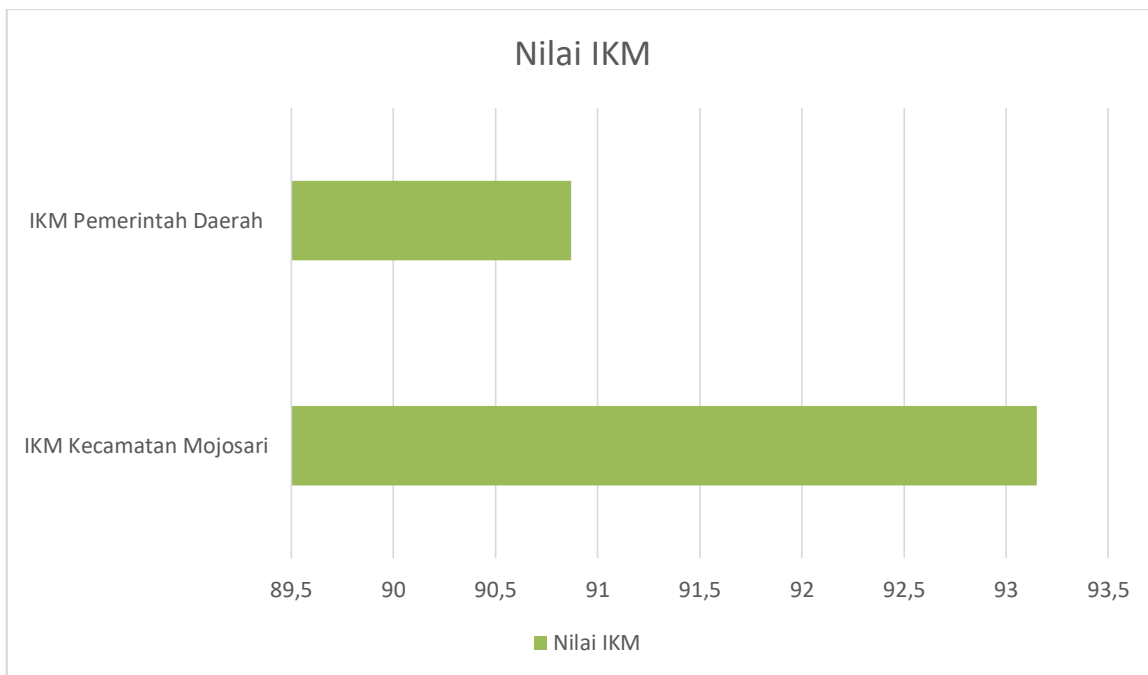
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Berdasarkan hasil pengukuran, nilai IKM Kecamatan menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai IKM Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Kecamatan dinilai lebih baik oleh masyarakat dibandingkan dengan rata-rata pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan grafik, sebagai berikut:

Dengan adanya berbagai aplikasi yang ada di Kabupaten Mojokerto, akuntabilitas kinerja di Kabupaten Mojokerto, khususnya Kecamatan Mojosari, lebih sistematis, efektif, dan efisien. Dibuktikan dengan nilai hasil evaluasi AKIP Kecamatan Mojosari yang mendapatkan predikat A dengan nilai sebesar 84,32. Peningkatan kinerja juga dibuktikan melalui nilai SAKIP Kecamatan Trowulan yang lebih baik dari tahun sebelumnya sebesar 82,30. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nilai SAKIP Kabupaten Mojokerto namun lebih rendah dibandingkan nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan rincian, sebagai berikut:



Gambar 2. Grafik Perbandingan Nilai SAKIP

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Berdasarkan hasil pengukuran, nilai IKM Kecamatan menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai IKM Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Kecamatan dinilai lebih baik oleh masyarakat dibandingkan dengan rata-rata pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan grafik, sebagai berikut:



III.4 Akuntabilitas Anggaran

Anggaran Kecamatan Mojosari tahun 2025 adalah sebesar Rp. 10.807.365.855 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp. 9.759.995.720 atau sebesar 90,31% dari total pagu anggaran dengan rincian, sebagai berikut :

Tabel III.4
Realisasi Anggaran Tahun 2025

OPD/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI S/D DESEMBER (Rp)	%
KECAMATAN MOJOSARI	10.807.365.855	9.759.995.720	90,31%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.697.421.790	6.188.773.896	92,41%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	9.777.300	97,77%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	8.029.000	80,29%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.991.835.000	5.557.348.669	92,75%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	29.335.980	97,79%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.286.790	30.430.000	97,26%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	92.000.000	88.820.400	96,54%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.000.000	37.142.000	61,90%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	3.681.000	61,35%
Penyediaan Bahan/Material	60.000.000	56.467.775	94,11%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.000.000	10.137.042	53,35%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.000.000	67.528.050	80,39%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	166.500.000	164.758.000	98,95%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	77.200.000	67.186.000	87,03%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.000.000	34.725.980	99,22%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.600.000	23.406.700	95,15%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	23.900.000	22.354.500	93,53%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	23.900.000	22.354.500	93,53%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.582.472.065	3.134.246.955	87,49%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kauman	440.000.000	407.771.535	92,68%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kauman	308.821.930	270.771.547	87,68%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wonokusumo	439.087.000	402.898.584	91,76%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Wonokusumo	289.311.830	249.837.690	86,36%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sawahan	440.000.000	389.770.990	88,58%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sawahan	220.764.845	147.225.547	66,69%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mojosari	349.365.700	329.137.630	94,21%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mojosari	365.271.330	313.731.515	85,89%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sarirejo	445.158.500	417.984.150	93,90%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sarirejo	284.690.930	205.117.767	72,05%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	503.572.000	414.620.369	82,34%
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	38.300.000	34.113.348	89,07%
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	38.300.000	28.387.331	74,12%
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	283.972.000	228.046.658	80,31%
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	143.000.000	124.073.032	86,76%

Berdasarkan capaian program tersebut, dapat dilihat perbandingan capaian kinerja dengan keuangan, sebagai berikut:

Tabel III.5
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	100%	100%	100%	Rp. 6.697.421.790,00	Rp 6.188.773.896,00	92,41 %
		Persentase Realisasi Anggaran	92%	93,24%	101%			
2	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%	100%	100%	Rp. 23.900.000,00	Rp. 22.354.500,00	93,53 %
3	Terwujudnya kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	Rp. 3.582.472.065,00	Rp. 3.134.246.955,00	87,49 %
3	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang di tindaklanjuti	100%	100%	100%	Rp. 503.572.000,00	Rp. 414.620.369,00	82,34 %
			Rata-rata capaian		100 %	Total capaian		90,3%

Dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 90.3%, efisiensi kinerja Kecamatan Trowulan sebesar 9,7%.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Tahun pelaporan ini memiliki makna strategis bagi Kecamatan Mojosari karena berada pada dua fase perencanaan sekaligus, yaitu sebagai tahun akhir pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Periode 2021–2025 serta sebagai tahun awal transisi menuju RENSTRA Periode 2025–2029. Dengan demikian, capaian kinerja yang disajikan dalam laporan ini tidak hanya menggambarkan keberhasilan pelaksanaan kinerja tahunan, tetapi juga menjadi tolok ukur keberhasilan perencanaan jangka menengah sekaligus pijakan awal bagi arah pembangunan kinerja pada periode selanjutnya.

Capaian kinerja Kecamatan Mojosari pada periode pelaporan menunjukkan hasil yang cukup baik, tercermin dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan yang berjalan sesuai dengan rencana serta tingkat pencapaian indikator kinerja yang sebagian besar telah memenuhi target yang ditetapkan. Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, fasilitasi pemerintahan desa/kelurahan, serta pelaksanaan koordinasi lintas sektor dapat terlaksana dengan efektif dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah Kecamatan. Begitu pula untuk capaian anggaran, dari pagu anggaran Kecamatan Mojosari Tahun 2025 sebesar Rp. 10.807.365.855 penyerapan/realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 9.759.995.720 atau 90,31%.

Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek kinerja yang perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal optimalisasi pelayanan, penguatan kapasitas sumber daya aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya, dinamika kebutuhan masyarakat, serta kompleksitas permasalahan wilayah menjadi faktor yang mempengaruhi capaian kinerja secara keseluruhan.

B. Upaya Perbaikan Kinerja

Sebagai langkah strategis untuk peningkatan kinerja di tahun-tahun mendatang, Kecamatan Mojosari akan melakukan beberapa perbaikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas ASN:

Melalui pelatihan, bimtek, serta pengembangan kompetensi berbasis tugas dan fungsi agar profesionalitas aparatur semakin meningkat.

2. Peningkatan Kualitas Tata Kelola:

Penguatan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja berbasis teknologi informasi agar lebih efektif, efisien, dan transparan.

3. Penguatan Inovasi Layanan Publik:

Mendorong terciptanya inovasi-inovasi baru yang berdampak langsung terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

4. Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor:

Meningkatkan komunikasi dan sinergi antar desa, OPD, dan mitra pembangunan dalam pelaksanaan kegiatan lintas bidang.

5. Pemantapan Tata Kelola Arsip dan Administrasi:

Guna menjawab kelemahan dalam sistem kearsipan dan pemahaman tupoksi, akan dilakukan standarisasi SOP serta sosialisasi internal secara berkala.

Selain upaya perbaikan kinerja diatas Kecamatan Mojosari juga memanfaatkan hasil rekomendasi SAKIP sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola kinerja. Tindak lanjut yang dilakukan meliputi:

1. Kecamatan Mojosari akan menyusun dan menetapkan Dokumen Perencanaan sesuai dengan format dan ketentuan yang berlaku

2. Pengukuran Kinerja di Kecamatan Mojosari telah dilakukan hingga level individu pegawai.

3. Kecamatan Mojosari telah melengkapi laporan kinerja dengan analisis terhadap perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja level Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Provinsi.

4. Laporan kinerja telah dilengkapi dengan analisis mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap efisiensi pencapaian kinerja.

5. Laporan Kinerja Kecamatan Mojosari telah dilengkapi dengan analisa kegagalan pada sub kegiatan yang belum mencapai target

6. Laporan Kinerja Kecamatan Mojosari telah membuat uraian pemanfaatan seluruh rekomendasi SAKIP dalam rangka peningkatan kinerja secara keseluruhan.

7. Laporan Kinerja Kecamatan Mojosari telah Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam mendukung efektifitas kinerja diantaranya dengan merumuskan hasil efisiensi perangkat daerah tahun lalu dalam mendukung peningkatan capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang memiliki kontribusi signifikan pada sasaran strategis

Melalui langkah-langkah tersebut, Kecamatan Mojosari berupaya meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas kinerja, sekaligus mendorong pelayanan publik yang lebih baik dan berorientasi pada hasil (*result-oriented government*). Kecamatan Mojosari berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel demi terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang maju, adil, dan makmur.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2025 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Kekurangan yang terjadi selama 2025 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025
2. Perjanjian Kinerja P APBD Tahun 2025
3. Laporan Kinerja E-81 2025



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN MOJOSARI
KABUPATEN MOJOKERTO**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YULIUS BAKHTIAR, S.P., M.M.
Jabatan : Ptl. CAMAT MOJOSARI KABUPATEN MOJOKERTO

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si
Jabatan : BUPATI MOJOKERTO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 24 Januari 2025

Pihak Kedua
BUPATI MOJOKERTO

dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama
Ptl. CAMAT MOJOSARI
KABUPATEN MOJOKERTO

YULIUS BAKHTIAR, S.P., M.M.
Pembina
NIP 196907291994031006

Lampiran :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN MOJOSARI
KABUPATEN MOJOKERTO**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	88,5

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,5(A)
		3.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	91,50%
		3.3 Indeks Profesionalitas ASN	82 (Tinggi)
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.485.930.000	APBD 2025
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 25.000.000	APBD 2025
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 275.000.000	APBD 2025 APBD DAU
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 4.038.790.000	APBD 2025

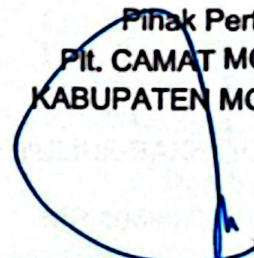
Mojokerto, 24 Januari 2025

Pihak Kedua
BUPATI MOJOKERTO



dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama
Plt. CAMAT MOJOSARI
KABUPATEN MOJOKERTO



YULIUS BAKHTIAR, S.P., M.M.
Pembina
NIP 196907291994031006



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN MOJOSARI
KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yulius Bakhtiar, S.P., M.M.
Jabatan: Plt. Camat Mojosari Kabupaten Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Albarraa
Jabatan: Bupati Mojokerto

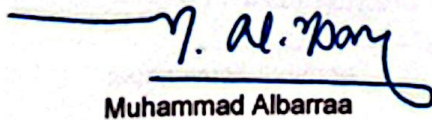
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Mojokerto, 30 September 2025

Pihak Kedua
Bupati Mojokerto



Muhammad Albarraa

Pihak Pertama
Plt. Camat Mojosari
Kabupaten Mojokerto



Yulius Bakhtiar, S.P., M.M.
Pembina/ IVa
NIP 196907291994031006

Lampiran

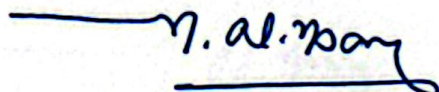
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN MOJOSARI
KABUPATEN MOJOKERTO

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	92
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	83
3	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%
4	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.224.893.790	PAPBD 2025
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 23.900.000	PAPBD 2025
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 3.582.472.065	PAPBD 2025 PAPBD DAU
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 503.572.000	PAPBD 2025

Mojokerto, 30 September 2025

Pihak Kedua
Bupati Mojokerto



Muhammad Albarraa

Pihak Pertama
Plt. Camat Mojosari
Kabupaten Mojokerto



Yulius Bakhtiar, S.P., M.M.
Pembina/ IVa
NIP 196907291994031006

3	[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kecamatan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu(Dokumen)	60.800.000,00	43.629.300,00	13,00	7.300.000,00	3,00	3798500	4,00	-256000	0,00	508800	0,00	0	7,00
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)			12,00	3.800.000,00	3,00	2.498.500,00	3,00	-500.000,00	0,00	508.800,00	0,00	0,00	6,00
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)			16,00	3.500.000,00	4,00	1.300.000,00	4,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3	[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu(Laporan)	39.847.468.627,00	18.277.641.798,00	14,00	6.508.930.000,00	4,00	1416890672	4,00	1628622584	0,00	410421555	0,00	0	8,00
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)			43,00	6.508.930.000,00	43,00	1.416.890.672,00	0,00	1.628.622.584,00	0,00	410.421.555,00	0,00	0,00	43,00
3	[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran(Persentase)	1.115.300.000,00	1.137.257.655,00	86,00	285.900.000,00	23,00	36503400	25,00	57381375	0,00	25933900	0,00	0	48,00
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)			1,00	30.000.000,00	0,50	7.507.000,00	0,00	7.519.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)			1,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)			1,00	92.000.000,00	0,25	7.203.400,00	0,25	28.772.000,00	0,00	11.025.000,00	0,00	0,00	0,50
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)			1,00	60.000.000,00	0,25	8.010.000,00	0,25	3.460.000,00	0,00	1.025.000,00	0,00	0,00	0,50
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan(Dokumen)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)			1,00	6.000.000,00	0,25	825.000,00	0,25	1.203.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,50
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)			1,00	60.000.000,00	0,25	9.958.000,00	0,25	14.427.375,00	0,00	12.608.900,00	0,00	0,00	0,50
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)			12,00	17.900.000,00	3,00	3.000.000,00	3,00	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	6,00
3	[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang kantor(Persentase)	444.900.000,00	687.787.950,00	88,00	256.400.000,00	23,00	57655500	25,00	54548800	0,00	19661700	0,00	0	48,00
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)			12,00	80.000.000,00	3,00	15.017.500,00	3,00	14.948.800,00	0,00	3.851.700,00	0,00	0,00	6,00
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)			12,00	176.400.000,00	3,00	42.638.000,00	3,00	39.600.000,00	0,00	15.810.000,00	0,00	0,00	6,00
3	[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah(Persentase)	552.300.000,00	547.717.350,00	100,00	125.000.000,00	24,00	22145500	26,00	24963700	0,00	7900000	0,00	0	50,00
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit)			8,00	75.600.000,00	3,00	15.402.000,00	1,00	19.474.000,00	0,00	6.900.000,00	0,00	0,00	4,00
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			3,00	30.000.000,00	0,00	1.985.000,00	1,00	1.850.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1,00
4	[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			14,00	19.400.000,00	3,00	4.758.500,00	3,00	3.639.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
2	[PROGRAM] 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat(Persentase)	24.123.815.000,00	6.694.421.750,00	81,00	3.436.609.500,00	21,00	0,00	27,00	809.921.372,00	0,00	67.780.680,00	0	0	48,00
3	[KEGIATAN] 7.01.03.2.02.0002 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan(Kegiatan)	0,00	0,00	20,00	336.188.300,00	0,00	0	11,00	259754900	0,00	0	0,00	0	11,00
[Target Capaian Sub Kegiatan]															51,77 %
[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]		Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 4											
[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]		Tersedianya anggaran yang memadai	Penggunaan teknologi dan digitalisasi pemerintah mempermudah capaian kinerja												
[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]		Adanya efisiensi anggaran	Adanya efisiensi anggaran dan kekurangan pegawai												
[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]		1. Optimalisasi penggunaan anggaran dan efisiensi kegiatan 2. Meningkatkan sinkronisasi data perencanaan dan kinerja	1. Efektivitas dan efisiensi pengaturan anggaran dan rangkap pekerjaan 2. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk percepatan kinerja												
		1. Efektivitas dan efisiensi pengaturan anggaran untuk kegiatan 2. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan sesuai target yang telah ditentukan	1. Efektivitas dan efisiensi pengaturan anggaran untuk kegiatan dan penambahan pegawai 2. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan sesuai target yang telah ditentukan												


P. CAMAT MOJOSARI
YULIUS BAKHTIAR, S.P., M.M.
 Pembina
 NIP. 196907291994031006

ian Kinerja dan Perangkat Daerah	Realisasi Capaian Kinerja Dan	Tingkat Capaian Kinerja dan	Unit Perangkat Daerah	Total Realisasi dan Anggaran sampai dengan triwulan								Hasil Evaluasi	
				I		II		III		IV		Kuantitas (%)	
				24	26	27	28	29	K	R	K	R	K
R	R	R	Kecamatan Mojosari	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R
11.786.500,00	120.313.800,00	56,31	Kecamatan Mojosari	225,00	4.635.000,00	500,00	10.572.000,00	500,00	11.786.500,00	500,00	11.786.500,00	0,00	0,00
11.786.500,00	120.313.800,00	56,31	Kecamatan Mojosari	225,00	4.635.000,00	500,00	10.572.000,00	500,00	11.786.500,00	500,00	11.786.500,00	0,00	0,00
11.786.500,00			Kecamatan Mojosari	1,00	4.635.000,00	2,00	10.572.000,00	2,00	11.786.500,00	2,00	11.786.500,00	0,00	0,00
136.644.000,00	1.082.799.300,00	56,99	Kecamatan Mojosari	3,00	50.520.000,00	6,00	116.454.000,00	6,00	136.644.000,00	6,00	136.644.000,00	0,00	0,00
136.644.000,00	1.082.799.300,00	56,99	Kecamatan Mojosari	7,00	50.520.000,00	16,00	116.454.000,00	16,00	136.644.000,00	16,00	136.644.000,00	0,00	0,00
21.339.000,00			Kecamatan Mojosari	2,50	10.390.000,00	5,00	15.539.000,00	5,00	21.339.000,00	5,00	21.339.000,00	0,00	0,00
17.715.000,00			Kecamatan Mojosari	1,50	15.510.000,00	3,00	15.510.000,00	3,00	17.715.000,00	3,00	17.715.000,00	0,00	0,00
29.185.000,00			Kecamatan Mojosari	1,50	14.980.000,00	3,00	20.080.000,00	3,00	29.185.000,00	3,00	29.185.000,00	0,00	0,00
68.405.000,00			Kecamatan Mojosari	1,50	9.640.000,00	3,00	65.325.000,00	3,00	68.405.000,00	3,00	68.405.000,00	0,00	0,00
3.766.679.986,00	24.616.788.539,00	58,31	Kecamatan Mojosari	0,00	1.536.993.572,00	0,00	3.302.254.031,00	0,00	3.766.679.986,00	0,00	3.766.679.986,00	0,00	0,00
4.051.300,00	47.680.600,00	78,42	Kecamatan Mojosari	3,00	1.536.993.572,00	7,00	3.302.254.031,00	7,00	3.766.679.986,00	7,00	3.766.679.986,00	0,00	0,00
2.507.300,00			Kecamatan Mojosari	3,00	2.498.500,00	6,00	1.998.500,00	6,00	2.507.300,00	6,00	2.507.300,00	0,00	0,00
1.544.000,00			Kecamatan Mojosari	4,00	1.300.000,00	8,00	1.544.000,00	8,00	1.544.000,00	8,00	1.544.000,00	0,00	0,00
3.455.934.811,00	21.733.576.609,00	54,54	Kecamatan Mojosari	4,00	1.536.993.572,00	8,00	3.302.254.031,00	8,00	3.766.679.986,00	8,00	3.766.679.986,00	0,00	0,00
3.455.934.811,00			Kecamatan Mojosari	43,00	1.416.890.672,00	43,00	3.045.513.256,00	43,00	3.455.934.811,00	43,00	3.455.934.811,00	0,00	0,00
119.818.675,00	1.257.076.330,00	112,71	Kecamatan Mojosari	23,00	1.536.993.572,00	48,00	3.302.254.031,00	48,00	3.766.679.986,00	48,00	3.766.679.986,00	0,00	0,00
15.026.000,00			Kecamatan Mojosari	0,50	7.507.000,00	0,50	15.026.000,00	0,50	15.026.000,00	0,50	15.026.000,00	0,00	0,00
			Kecamatan Mojosari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.000.400,00			Kecamatan Mojosari	0,25	7.203.400,00	0,50	35.975.400,00	0,50	47.000.400,00	0,50	47.000.400,00	0,00	0,00
12.495.000,00			Kecamatan Mojosari	0,25	8.010.000,00	0,50	11.470.000,00	0,50	12.495.000,00	0,50	12.495.000,00	0,00	0,00
2.303.000,00			Kecamatan Mojosari	0,25	825.000,00	0,50	2.028.000,00	0,50	2.303.000,00	0,50	2.303.000,00	0,00	0,00
36.994.275,00			Kecamatan Mojosari	0,25	9.958.000,00	0,50	24.385.375,00	0,50	36.994.275,00	0,50	36.994.275,00	0,00	0,00
6.000.000,00			Kecamatan Mojosari	3,00	3.000.000,00	6,00	5.000.000,00	6,00	6.000.000,00	6,00	6.000.000,00	0,00	0,00
131.866.000,00	819.653.950,00	184,23	Kecamatan Mojosari	23,00	1.536.993.572,00	48,00	3.302.254.031,00	48,00	3.766.679.986,00	48,00	3.766.679.986,00	0,00	0,00
33.818.000,00			Kecamatan Mojosari	3,00	15.017.500,00	6,00	29.966.300,00	6,00	33.818.000,00	6,00	33.818.000,00	0,00	0,00
98.048.000,00			Kecamatan Mojosari	3,00	42.638.000,00	6,00	82.238.000,00	6,00	98.048.000,00	6,00	98.048.000,00	0,00	0,00
55.009.200,00	602.726.550,00	109,13	Kecamatan Mojosari	24,00	1.536.993.572,00	50,00	3.302.254.031,00	50,00	3.766.679.986,00	50,00	3.766.679.986,00	0,00	0,00
41.776.000,00			Kecamatan Mojosari	3,00	15.402.000,00	4,00	34.876.000,00	4,00	41.776.000,00	4,00	41.776.000,00	0,00	0,00
4.835.000,00			Kecamatan Mojosari	0,00	1.985.000,00	1,00	3.835.000,00	1,00	4.835.000,00	1,00	4.835.000,00	0,00	0,00
8.398.200,00			Kecamatan Mojosari	3,00	4.758.500,00	6,00	8.398.200,00	6,00	8.398.200,00	6,00	8.398.200,00	0,00	0,00

